

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk mengenai isu-isu Keagamaan dan pemerintah. Informasi yang tersebar luas dengan cepat melalui media daring dan media sosial dapat membentuk opini publik, sehingga instansi pemerintah dituntut untuk mampu memantau dinamika informasi serta merespons isu secara tepat melalui pengelolaan komunikasinya.

Media monitoring merupakan proses memantau, mengumpulkan, dan menganalisis pemberitaan yang tersebar di media massa maupun media sosial terkait suatu topik yang sedang dibicarakan oleh publik. Kegiatan *media monitoring* merupakan alat bagi lembaga dalam memantau dan mengevaluasi pemberitaan serta percakapan publik yang berkembang di media. Hasil *media monitoring* digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis untuk menentukan langkah komunikasi selanjutnya, sehingga menjadi acuan dalam penyusunan strategi komunikasi yang lebih terarah dan berbasis data.

Pelaksanaan pembinaan keagamaan di Indonesia terus dilakukan melalui berbagai kegiatan yang langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, seperti penyuluhan, bimbingan, dan dakwah. Kegiatan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya penguatan nilai-nilai spiritual di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Bimas Islam sebagai lembaga yang bertanggung jawab

di bidang pembinaan keagamaan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program berjalan sesuai dengan tujuan pembinaan yang menekankan pada pemahaman agama yang moderat dan toleran. Pembinaan Bimas Islam yang berkesinambungan, mengharapkan masyarakat tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Media monitoring di era digital menjadi sangat krusial sebagai bagian dari kehumasan yang dinamis dan responsif. Berdasarkan data dari *We Are Social* (2025) jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212 juta jiwa dengan 143 juta, di antaranya aktif di media sosial, sehingga informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas melalui platform digital seperti situs berita dan media sosial. Analisis ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas mengubah cara humas dalam menjalankan monitoring media secara *real-time*, yang menuntut kemampuan tidak hanya memantau konten tapi juga merespon isu secara cepat agar dapat menjaga citra dan legitimasi institusi di tengah arus informasi yang begitu deras dan beragam.

Media monitoring dalam pemerintahan memiliki peran strategis sebagai instrumen penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan pedoman monitoring media yang dilakukan kehumasan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, fungsi humas pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi program dan kebijakan, tetapi juga menyerap aspirasi publik, mengelola krisis komunikasi, dan memantau citra instansi melalui berbagai kanal media, termasuk media sosial yang kini

menjadi ruang utama diskusi publik. Analisis tersebut menegaskan bahwa monitoring media di pemerintahan tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam mendeteksi isu publik secara dini, mengevaluasi persepsi masyarakat, dan memberikan rekomendasi strategi komunikasi yang tepat sehingga mendukung transparansi, responsivitas, dan, trust building antara pemerintah dan publik.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Berdasarkan data observasi Wirayudha, M. (2024) berjudul “Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Pemerintah untuk Meningkatkan Partisipasi Publik di Kabupaten Klaten”, kurangnya optimalisasi pemanfaatan media sosial pemerintah berpengaruh terhadap penyebaran informasi dan keterlibatan masyarakat, sehingga diperlukan pengelolaan konten yang lebih strategis dan interaktif. Media sosial pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi satu arah, tetapi juga sebagai ruang komunikasi dua arah yang mendorong partisipasi publik, transparansi, dan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inklusif.

Penggunaan media sosial di masyarakat Indonesia semakin menjadi sumber utama dalam mencari informasi sehari-hari. Berdasarkan data observasi dari Databoks (2022) berjudul "Mayoritas Warga RI Cari Informasi di Media Sosial", pada Januari 2022 jumlah pengguna aktif media sosial mencapai 191,4 juta orang, atau sekitar 68,9 persen dari total populasi. Data ini menegaskan pentingnya media sosial sebagai saluran utama komunikasi, di mana masyarakat lebih memilih cepatnya akses berita melalui platform digital dibandingkan media konvensional. Fenomena ini menjadi

peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyampaikan komunikasi dan edukasi publik secara akurat dan terpercaya.

Besarnya penggunaan media sosial juga memicu meluasnya hoaks, salah satunya mengenai layanan pemerintah seperti KUA (Kantor Urusan Agama). Berdasarkan hasil observasi dari akun resmi Instagram Bimas Islam (@bimasislam), yang rutin mengunggah klarifikasi dan informasi rinci tentang layanan KUA, termasuk membantah hoax mengenai waktu dan pelayanan KUA, terlihat komitmen Bimas Islam dalam menyebarkan informasi resmi dan akurat. Postingan klarifikasi yang konsisten ini mampu meredam misinformasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Analisis ini menegaskan peran media sosial tidak hanya sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai alat pembenahan fakta dan edukasi masyarakat secara *real-time*. (Data diambil dari observasi virtual melalui media sosial resmi Instagram @/bimasislam pada tanggal 16 September 2025).

Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) merupakan salah satu direktorat jenderal Kementerian Agama yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kehidupan beragama di Indonesia. Lembaga ini berperan sebagai fasilitator, pengarah, dan pengawas terhadap berbagai kegiatan keagamaan yang dijalankan di masyarakat. Peran strategis Bimas Islam dalam pembinaan keagamaan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pemahaman agama masyarakat, tetapi juga pada terciptanya stabilitas sosial yang berakar pada nilai spiritual dan moral. Keberadaan Bimas Islam menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara.

Program TikTalk yang diadakan oleh Bimas Islam merupakan inovasi dakwah dan pelayanan keagamaan yang memanfaatkan fitur *live* TikTok untuk menjawab langsung pertanyaan dari masyarakat. Berdasarkan data hasil observasi dari akun resmi TikTok Bimas Islam (@bimas.islam), program ini memungkinkan interaksi *real-time* yang efektif antara penyuluh agama dan umat, sehingga pembinaan keagamaan menjadi lebih dinamis dan mudah diakses oleh khalayak luas, khususnya generasi muda yang aktif di *platform* digital. Pemanfaatan teknologi digital seperti TikTalk tidak hanya memperkuat komunikasi dua arah, tetapi juga memperluas jangkauan dakwah dan pelayanan keagamaan yang responsif terhadap kebutuhan dan isu aktual di masyarakat, sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan secara langsung dan interaktif. (Data diambil dari observasi virtual melalui media sosial resmi TikTok @/bimasislam pada tanggal 16 September 2025).

Media monitoring merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh humas Bimas Islam, terutama dalam memantau percakapan publik mengenai pembinaan keagamaan dan layanan umat di media sosial. Berdasarkan pengalaman magang yang dilakukan penulis, aktivitas ini dimulai dari mengamati isu apa saja yang sedang ramai dibahas masyarakat, seperti layanan pencatatan nikah, kegiatan penyuluhan, dan kebijakan yang sedang diterapkan. Isu tersebut dikaji untuk melihat apakah terdapat kesalahpahaman, kebutuhan klarifikasi, atau potensi gangguan informasi yang berkaitan pada pemahaman keagamaan masyarakat.

Media sosial yang menyebarkan informasi secara luas dan cepat mampu membentuk opini publik terkait isu keagamaan. Kesalahan informasi atau hoaks yang

muncul, direspon oleh humas Bimas Islam dengan segera melakukan tindakan untuk menentukan langkah klarifikasi yang tepat. Klarifikasi kemudian disampaikan melalui akun resmi Bimas Islam, baik media sosial Instagram @bimasislam dan website agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Proses tersebut terlihat bahwa kegiatan *media monitoring* menjadi dasar penting dalam menentukan langkah komunikasi Bimas Islam, karena sebagian besar dinamika opini publik muncul dan berkembang di media sosial.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik mengkaji bagaimana aktivitas *media monitoring* di Bimas Islam dijalankan dalam konteks pembinaan keagamaan. Perubahan pola konsumsi informasi yang beralih ke media sosial membuat monitoring menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa pesan pembinaan keagamaan tersampaikan dengan akurat dan tidak terdistorsi oleh informasi yang keliru. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana Bimas Islam memantau isu, merespons perkembangan informasi, serta menjaga agar pembinaan keagamaan tetap berjalan efektif di tengah arus informasi digital yang bergerak sangat cepat.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian “Aktivitas *Media monitoring* Pada Pembinaan Keagamaan Oleh Bimas Islam” dapat ditetapkan dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

- 1) Bagaimana strategi Humas Bimas Islam dalam menemukan (*to find*) seluruh pemberitaan terkait Bimas Islam di berbagai media?

- 2) Bagaimana metode Humas Bimas Islam dalam mendeteksi (*to detect*) kategori serta kebenaran informasi dalam seluruh pemberitaan tentang Bimas Islam?
- 3) Bagaimana upaya Humas Bimas Islam dalam mengantisipasi (*to deter*) pemberitaan negatif mengenai Bimas Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui strategi Humas Bimas Islam dalam menemukan (*to find*) seluruh pemberitaan terkait Bimas Islam di berbagai media.
- 2) Mengetahui metode yang digunakan Humas Bimas Islam dalam mendeteksi (*to detect*) kategori serta kebenaran informasi dalam seluruh pemberitaan tentang Bimas Islam
- 3) Mengetahui upaya Humas Bimas Islam dalam mengantisipasi (*to deter*) pemberitaan negatif mengenai Bimas Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada bidang *Public Relations* yang berkaitan dengan aktivitas *media monitoring* di lingkungan Bimas Islam. Penelitian ini

diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian selanjutnya mengenai implementasi *media monitoring* pada lembaga keagamaan pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan konsep dan pemahaman teoritis terkait praktik *media monitoring* dalam konteks kehumasan institusi publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tahapan teknis *media monitoring* yang dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, mulai dari proses pengumpulan, pengklasifikasian, hingga analisis pemberitaan di berbagai media. Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi kehumasan dalam memahami penerapan *media monitoring* secara sistematis sebagai alat pemantauan isu, pengukuran sentimen pemberitaan, serta sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan komunikasi dan penyusunan strategi kehumasan.

1.5 Landasan Pemikiran

1.5.1 Landasan teoritis

Landasan teoritis berperan sebagai kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2013:81), landasan teori merupakan bagian yang memuat konsep, proposisi, serta definisi yang digunakan untuk mengkaji fenomena penelitian secara sistematis. Landasan teori berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam memahami suatu fenomena secara mendalam dan terarah, serta membantu membangun sudut pandang yang konsisten sepanjang proses penelitian.

Landasan teoritis dalam penelitian ini dibangun dengan mengadopsi teori *media monitoring* yang dikemukakan oleh William J. Comcowich dalam bukunya *Media monitoring: The Complete Guide*. Comcowich menekankan bahwa *media monitoring* merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk membantu organisasi memahami bagaimana isu, kebijakan, dan aktivitasnya diberitakan serta dipersepsikan oleh publik. Dalam konteks Bimas Islam sebagai unit kerja di bawah Kementerian Agama, *media monitoring* menjadi bagian penting dari aktivitas kehumasan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengantisipasi isu publik yang berkembang di media.

Media monitoring merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk membantu organisasi memahami bagaimana isu, kebijakan, dan aktivitasnya diberitakan serta dipersepsikan oleh publik. Comcowich (2010) dalam *Media monitoring: The Complete Guide* menekankan bahwa *media monitoring* melibatkan identifikasi, pengelompokan, penyimpanan, dan analisis konten berdasarkan kata kunci relevan. Elemen *media monitoring* memberikan arah dalam mendeteksi opini publik, mendukung pengambilan keputusan komunikasi, serta menciptakan kesesuaian antara citra organisasi dengan persepsi publik. *Media monitoring* terlihat dari konsistensi pemantauan konten media massa dan digital.

Penerapan *media monitoring* yang konsisten membantu membentuk strategi kehumasan yang proaktif dan memperkuat kredibilitas lembaga. Bimas Islam mencerminkan elemen *media monitoring* melalui aktivitas kehumasan Kemenag yang masih terbatas pada deteksi manual. Berdasarkan berita Antara, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI mendorong penyuluh agama melek teknologi untuk dakwah digital,

namun implementasi monitoring hoaks masih reaktif. Selain itu, situs Kemenag mencatat undangan media untuk siaran keagamaan Ramadan, menunjukkan orientasi awal terhadap pemantauan pemberitaan.

Media monitoring dipahami sebagai aktivitas pemantauan pemberitaan mengenai program dakwah, pendidikan Islam, layanan keagamaan, serta isu-isu keislaman yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bimas Islam. Teori *media monitoring* Comcowich digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat bagaimana Bimas Islam mengelola informasi media secara sistematis. Menurut Comcowich, *media monitoring* terdiri atas tiga fungsi utama, yaitu *to find*, *to detect*, dan *to deter*. Ketiga fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) *To find* (Pencarian dan Pengumpulan Informasi Media)

Fungsi *to find* merupakan tahap awal dalam *media monitoring* yang berfokus pada pencarian dan pengumpulan informasi dari berbagai media. Comcowich (2010) menjelaskan bahwa organisasi perlu secara aktif menemukan dan mengumpulkan seluruh pemberitaan yang relevan agar memiliki gambaran menyeluruh mengenai bagaimana isu tertentu muncul dan berkembang di media. Proses ini melibatkan penentuan kata kunci, pemilihan media yang dipantau, serta pengumpulan berita secara konsisten.

Elemen *to find* memberikan arah dalam mengidentifikasi intensitas pemberitaan, topik dominan, dan media utama. Fungsi *to find* terlihat dari konsistensi pengumpulan data relevan. Penerapan *to find* yang konsisten membantu organisasi memetakan perkembangan isu secara akurat. Bimas Islam mencerminkan fungsi *to find* melalui

monitoring Kasi Bimas Islam di tingkat KUA. Berdasarkan laporan Kemenag Wajo dan Sumut, pengumpulan data dilakukan manual pada penyuluh agama dan KUA Teluk Nibong, dengan intensitas pemberitaan program rendah. Prosedur tersebut mengindikasikan perhatian terhadap informasi lokal namun keterbatasan coverage nasional dan digital.

2) *To detect* (Deteksi Tone dan Sentimen Pemberitaan)

Fungsi *to detect* berkaitan dengan proses mendeteksi kecenderungan isi pemberitaan, termasuk penilaian *tone* atau sentimen media terhadap organisasi. Comcowich (2010) menyatakan bahwa *media monitoring* harus mampu mengidentifikasi apakah suatu pemberitaan bersifat positif, negatif, atau netral, karena sentimen media mencerminkan sikap dan persepsi publik terhadap organisasi. Deteksi ini penting untuk memahami potensi dukungan maupun kritik yang berkembang di ruang publik.

Elemen *to detect* memberikan arah dalam menganalisis framing media terhadap program organisasi. Fungsi *to detect* terlihat dari penilaian konsisten terhadap sikap media. Penerapan *to detect* yang konsisten membantu menentukan langkah komunikasi sesuai persepsi publik. Bimas Islam mencerminkan fungsi *to detect* melalui analisis isu moderasi beragama. Berdasarkan situs Kemenag Pandeglang, diskusi konflik keagamaan menunjukkan sentimen netral hingga negatif tanpa analisis sistematis. Selain itu, penguatan dakwah media di Lamongan menyoroti kebutuhan deteksi *framing* pemberitaan.

3) *To deter* (Antisipasi dan Pencegahan Isu Negatif)

Fungsi *to deter* merupakan tahap lanjutan dalam *media monitoring* yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah potensi isu negatif. Comcowich (2010) menegaskan bahwa *media monitoring* seharusnya bersifat proaktif, bukan sekadar reaktif, sehingga organisasi dapat mendeteksi potensi krisis, kesalahpahaman informasi, atau pemberitaan negatif sejak dini. Melalui fungsi ini, organisasi dapat menyiapkan respons komunikasi yang tepat sebelum isu berkembang lebih luas.

Bimas Islam mengaplikasikan fungsi *to deter* digunakan untuk mengantisipasi isu-isu sensitif yang berkaitan dengan kebijakan keagamaan atau program pembinaan umat yang berpotensi menimbulkan polemik di media. Hasil *media monitoring* pada tahap ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam merumuskan strategi komunikasi, klarifikasi informasi, serta pengelolaan isu agar citra dan kredibilitas lembaga tetap terjaga.

Elemen *to deter* terlihat dari kesiapan menghadapi polemik media. Penerapan *to deter* yang konsisten menjaga kredibilitas lembaga dari isu sensitif. Bimas Islam mencerminkan fungsi *to deter* melalui penanganan hoaks dakwah digital. Berdasarkan jurnal UIN Alauddin, fenomena hoaks dalam dakwah menyebar cepat tanpa deteksi dini, sementara NU.or.id mencatat undangan media Islam akibat provokasi. Prosedur tersebut mengindikasikan orientasi pencegahan konflik keagamaan namun respons masih lambat.

Melalui penerapan ketiga fungsi *media monitoring* menurut Comcowich tersebut, Bimas Islam dapat menjalankan aktivitas pemantauan media secara sistematis

dan strategis. Landasan teoritis ini menegaskan bahwa *media monitoring* tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan berita, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam evaluasi komunikasi publik dan pengambilan keputusan kehumasan secara berkelanjutan.

1.5.2 Landasan Konseptual

1) *Media monitoring*

Media monitoring merupakan proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk mengumpulkan, mengelola, serta menganalisis informasi yang tersebar di berbagai media guna memahami isu dan kecenderungan pemberitaan yang berkembang di ruang publik. Aktivitas ini mencakup pemantauan media massa dan media digital secara berkelanjutan sebagai bagian dari fungsi komunikasi strategis organisasi.

Media monitoring berfungsi sebagai alat pendukung pengambilan keputusan komunikasi yang berbasis data. Comcowich (2010) menjelaskan bahwa *media monitoring* adalah proses pemantauan media secara berkelanjutan dengan menggunakan kata kunci tertentu untuk mengidentifikasi isu, sentimen, dan tren pemberitaan yang relevan bagi organisasi. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk melakukan deteksi dini terhadap isu strategis, mengevaluasi dampak komunikasi, serta menyusun langkah respons yang terarah dan terukur.

Praktik kehumasan dalam melakukan *media monitoring* sering kali masih menghadapi kendala seperti keterbatasan alat pemantauan, sumber daya manusia, dan integrasi data lintas platform. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan serta

ketepatan analisis informasi. Oleh karena itu, *media monitoring* perlu dijalankan secara terstruktur dan berkesinambungan agar mampu mendukung pengelolaan isu dan reputasi organisasi secara optimal.

2) Humas Pemerintah

Humas pemerintah merupakan fungsi komunikasi publik yang berperan dalam menjembatani hubungan antara lembaga negara dan masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran humas pemerintah menjadi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi kebijakan secara jelas serta membuka ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan publik.

Peran Humas pemerintah secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan kewajiban badan publik untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Ruslan (2016) menyatakan bahwa humas pemerintah berfungsi sebagai pengelola komunikasi strategis yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memantau opini publik serta mengelola isu yang berkembang di media. Selain itu, dalam Pedoman Monitoring Media Kementerian Komunikasi dan Informatika ditegaskan bahwa monitoring media merupakan bagian integral dari tugas humas pemerintah sebagai dasar evaluasi komunikasi dan pengambilan keputusan strategis.

Humas pemerintah dihadapkan pada tantangan meningkatnya arus informasi digital, kecepatan penyebaran berita, serta potensi disinformasi di ruang publik. Oleh

karena itu, humas pemerintah dituntut untuk mengelola komunikasi secara proaktif, terintegrasi, dan berbasis data agar pesan yang disampaikan tetap kredibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan fungsi *media monitoring* menjadi langkah strategis untuk mendukung transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga legitimasi institusi pemerintah.

3) Opini Publik

Opini publik merupakan sikap dan pandangan kolektif masyarakat terhadap suatu isu, kebijakan, atau lembaga yang terbentuk melalui proses komunikasi sosial. Opini publik berkembang seiring dengan intensitas pemberitaan media serta interaksi masyarakat di ruang publik.

Opini publik berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai efektivitas komunikasi organisasi. Noelle-Neumann (1993) menjelaskan bahwa opini publik dipengaruhi oleh dominasi framing media dan kecenderungan individu untuk menyesuaikan diri dengan pandangan yang dianggap dominan. Oleh karena itu, pemantauan opini publik menjadi langkah strategis dalam memahami sikap masyarakat dan merancang komunikasi yang tepat sasaran.

Opini publik bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan isu dan arus informasi. Ketika suatu isu tidak dikelola secara tepat, opini publik berpotensi berkembang ke arah negatif dan memengaruhi citra organisasi. Pemantauan opini publik secara berkelanjutan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan sikap masyarakat dan mendukung pengelolaan komunikasi.

1.6 Langkah-Langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340. Pemilihan lokasi penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu untuk memperoleh data dan informasi mengenai aktivitas *media monitoring* yang dilaksanakan oleh Bimas Islam. Kantor Bimas Islam dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi dan pemantauan pemberitaan media yang berkaitan dengan kebijakan serta program keagamaan Islam.

1.6.2 Paradigma dan pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme karena paradigma ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dipahami secara berbeda oleh setiap individu. Realitas tidak dianggap sebagai satu kebenaran yang sama bagi semua orang, melainkan dibentuk dari pengalaman, interaksi, dan cara pandang masing-masing individu dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pemahaman terhadap suatu fenomena sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman subjek yang terlibat di dalamnya.

Pemahaman terhadap realitas sosial dalam paradigma konstruktivisme berangkat dari sudut pandang individu yang terlibat langsung dalam suatu fenomena. Creswell (2018:9) menjelaskan bahwa paradigma konstruktivisme berfokus pada cara individu menafsirkan pengalaman sosialnya untuk memahami dunia di sekitarnya. Pandangan tersebut digunakan untuk menggali bagaimana pegawai Bimas Islam memahami dan

menafsirkan aktivitas *media monitoring* berdasarkan pengalaman kerja dan peran mereka dalam mengelola pemberitaan keagamaan di media.

Paradigma konstruktivisme juga menekankan bahwa satu fenomena sosial dapat dipahami secara beragam oleh individu yang berbeda. Hal ini terjadi karena pemahaman seseorang dipengaruhi oleh proses komunikasi, bahasa, dan interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, paradigma ini memungkinkan peneliti untuk menangkap keberagaman pandangan pegawai Bimas Islam dalam melihat praktik *media monitoring* serta cara mereka menyikapi isu dakwah, pelayanan umat Islam, dan pemberitaan keagamaan di media.

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Creswell (2018:45) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini relevan dalam penelitian *media monitoring* Bimas Islam karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang kontekstual mengenai proses, pertimbangan, serta cara pegawai menafsirkan isi pemberitaan dan merespons opini publik umat Islam di media.

1.6.3 Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya menggambarkan secara sistematis

dan faktual proses *media monitoring* yang dilaksanakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai suatu fenomena dalam konteks alamiahnya. Moleong (2017:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada penyajian data deskriptif berupa kata-kata yang diperoleh dari subjek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami proses dan aktivitas yang terjadi secara utuh. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana proses *media monitoring* Bimas Islam dijalankan, mulai dari pemantauan media, pengumpulan berita, pengelompokan isu, hingga penyusunan laporan monitoring.

Penggunaan metode deskriptif pada penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan uraian yang objektif dan mendalam mengenai pelaksanaan *media monitoring* di Bimas Islam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendokumentasikan prosedur, alur kerja, serta pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas *media monitoring* secara detail, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik *media monitoring* di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif berupa kata-kata dan penjelasan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung terhadap objek penelitian, yakni Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Republik

Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menggambarkan secara rinci bagaimana aktivitas *media monitoring* dilaksanakan oleh Bimas Islam.

Data diperlukan sebagai dasar untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data mengenai cara Bimas Islam melakukan proses pencarian dan pengumpulan berita (*to find*) yang berkaitan dengan isu, program, dan kegiatan Bimas Islam di berbagai media.
- 2) Data mengenai cara Bimas Islam melakukan proses pendeteksian (*to detect*), termasuk pengelompokan isi pemberitaan serta penilaian kecenderungan berita, seperti positif, negatif, atau netral.
- 3) Data mengenai cara Bimas Islam melakukan upaya antisipasi (*to deter*) terhadap pemberitaan negatif atau isu sensitif yang berpotensi memengaruhi citra dan kinerja institusi.

Data merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam suatu penelitian, karena melalui data peneliti dapat memperoleh informasi serta gambaran yang akurat mengenai objek yang diteliti. Data menjadi dasar dalam proses analisis untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Moleong (2017:157) menjelaskan bahwa data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber yang memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi dalam menggambarkan proses *media monitoring* di Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia.

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Menurut Sugiyono (2019:225), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui pengumpulan data di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *media monitoring* di Bimas Islam. Data ini digunakan untuk menggali informasi mengenai proses pemantauan media, pengumpulan pemberitaan, pengelompokan isu, serta tindak lanjut terhadap hasil *media monitoring*.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sugiyono (2019:226) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber lain yang telah tersedia, seperti dokumen, arsip, atau publikasi yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen resmi Bimas Islam, laporan internal, website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, pemberitaan media massa, serta jurnal dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan aktivitas *media monitoring*. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi temuan data primer agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

1.6.5 Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan menjadi tahapan yang krusial dalam penelitian karena berkaitan langsung dengan kualitas dan kedalaman data yang diperoleh. Informan

dipahami sebagai pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa informan adalah individu yang memahami permasalahan penelitian secara langsung dan dapat menyampaikan data secara akurat serta sesuai dengan konteks penelitian. Ketepatan dalam menentukan informan sangat memengaruhi kemampuan peneliti dalam menggambarkan proses *media monitoring* Bimas Islam secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang selaras dengan fokus dan tujuan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Divisi Humas, Data, dan Informasi Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- 2) Staff Divisi Humas, Data, dan Informasi Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berjumlah dua orang.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Data berupa informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian sangat dibutuhkan untuk kemudian diolah dan dianalisis. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data

yang mampu menggambarkan secara jelas proses *media monitoring* yang dilaksanakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi secara rinci dan mendalam dari informan yang terlibat langsung dalam aktivitas *media monitoring*. Teknik ini dilakukan melalui proses tanya jawab yang terarah antara peneliti dan informan guna menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan atau observasi. Sugiyono (2012:231) menjelaskan bahwa wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, spesifik, dan mendalam mengenai suatu fenomena penelitian. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti memahami proses kerja dan pertimbangan informan secara lebih komprehensif berdasarkan pengalaman langsung mereka. Kegunaan wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah untuk menggali informasi terkait pelaksanaan *media monitoring* yang dilakukan oleh Bimas Islam dengan mengacu pada Teori *Media monitoring* William J. Comcowich, yaitu tahapan *to find* (menemukan dan mengumpulkan pemberitaan), *to detect* (mendeteksi kecenderungan dan isi pemberitaan), serta *to deter* (mengantisipasi dan menanggapi isu negatif). Melalui teknik ini, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis bagaimana alur *media monitoring* dijalankan oleh Bimas Islam.

2) Observasi Partisipatori Pasif

Observasi partisipatori pasif digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan terhadap aktivitas tanpa adanya keterlibatan langsung. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati proses kerja secara nyata di lingkungan penelitian sebagai pengamat. Sugiyono (2018:204) menyatakan bahwa observasi partisipatori memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memahami fenomena penelitian secara lebih mendalam karena peneliti berada dalam situasi yang diamati meskipun tidak terlibat aktif. Observasi partisipatori pasif membantu peneliti menangkap realitas pelaksanaan kegiatan secara faktual dan apa adanya.

Peneliti melakukan observasi partisipatori pasif dengan mengamati sebagian aktivitas *media monitoring* yang dilaksanakan oleh Bimas Islam. Pengamatan ini memungkinkan peneliti menyaksikan langsung proses pemantauan media, pengelompokan berita, hingga alur kerja pelaporan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat verbal tetapi juga empiris.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data pendukung yang bersifat tertulis maupun visual. Teknik ini berfungsi untuk melengkapi data utama yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Margono (2000:181) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen tertulis, arsip, catatan, atau bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data dokumenter dapat digunakan peneliti untuk melakukan pengecekan silang terhadap informasi yang diperoleh dari sumber lain.

Dokumentasi meliputi dokumen resmi Bimas Islam, laporan *media monitoring*, serta perangkat atau tools *media monitoring* yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini memperkuat validitas data dan membantu peneliti menyusun gambaran yang utuh mengenai proses *media monitoring* di Bimas Islam.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengelola dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Analisis data dilakukan agar informasi yang terkumpul dapat dipahami secara sistematis dan relevan dengan fokus penelitian. Creswell (2018) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pengorganisasian, pembacaan, pengkodean, hingga penafsiran data untuk menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengacu pada tahapan analisis data kualitatif menurut Creswell yang terdiri atas enam langkah, sebagai berikut:

1) Persiapan dan Pengelolaan Data

Tahap awal analisis data dimulai dengan menyiapkan dan mengelola seluruh data penelitian. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam aktivitas *media monitoring* Bimas Islam serta observasi partisipatori aktif terhadap pelaksanaan monitoring media. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan *media monitoring*, website Kementerian

Agama Republik Indonesia, serta arsip pemberitaan yang relevan. Seluruh data kemudian disusun, dipilah, dan dikelompokkan agar sesuai dengan fokus penelitian dan siap untuk dianalisis.

2) Membaca Data Secara Menyeluruh

Tahap selanjutnya adalah membaca seluruh data secara menyeluruh dan berulang untuk memperoleh pemahaman awal terhadap isi data. Proses ini dilakukan untuk menangkap konteks, pola, serta gambaran umum mengenai proses *media monitoring* yang dilaksanakan oleh Bimas Islam. Dengan membaca data secara cermat, peneliti dapat memahami alur kerja *media monitoring* serta hubungan antar informasi yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3) Pemberian Kode pada Data

Pada tahap ini, data yang telah dibaca kemudian diberi kode untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengkodean dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema awal yang relevan dengan Teori *Media monitoring* William J. Comcowich, yaitu *to find* (proses pencarian dan pengumpulan pemberitaan), *to detect* (proses pendeteksian isi dan kecenderungan pemberitaan), dan *to deter* (proses antisipasi terhadap isu atau pemberitaan negatif). Proses pengkodean ini membantu peneliti menyusun data secara lebih terstruktur.

4) Pengelompokan Kode ke dalam Tema

Kode-kode yang telah ditentukan kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang merepresentasikan proses *media monitoring* Bimas Islam. Tema-tema

tersebut disusun dan diuraikan dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis. Pada tahap ini, peneliti mulai menyusun laporan penelitian kualitatif dengan menampilkan hasil pengelompokan data berdasarkan tahapan *media monitoring* yang dijalankan.

5) Pengembangan Makna dari Temuan

Tahap ini berfokus pada penafsiran makna dari tema-tema yang telah terbentuk. Peneliti menganalisis keterkaitan antar tema untuk memahami bagaimana proses *media monitoring* Bimas Islam dijalankan secara menyeluruh. Analisis ini membantu menjelaskan bagaimana setiap tahapan *media monitoring* saling berhubungan, mulai dari pemantauan berita hingga tindak lanjut terhadap isu yang berkembang di media.

6) Penyajian Hasil Analisis

Tahap terakhir adalah menyajikan hasil analisis data dalam bentuk uraian yang runtut dan sistematis. Temuan penelitian disampaikan melalui penjelasan naratif yang didukung oleh kutipan hasil wawancara, catatan observasi, serta data dokumentasi yang relevan. Penyajian hasil analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses *media monitoring* yang dilaksanakan oleh Bimas Islam sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

1.6.8 Rencana Jadwal Penelitian

No.	Daftar Kegiatan	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
1.	Tahap pertama: Observasi lapangan dan pengumpulan data							
	Pengumpulan							

	data proposal dan penelitian							
	Penyusunan Proposal penelitian							
	Bimbingan proposal penelitian							
	Revisi proposal penelitian							
2.	Tahap Kedua: Usulan penelitian							
	Sidang Usulan Penelitian							
	Revisi Usulan Penelitian							
3.	Tahap Ketiga: Penyusunan Skripsi							
	Pelaksanaan penelitian							
	Melakukan Wawancara Mendalam							
	Analisis Pengolahan Data							

	Laporan Penelitian							
	Bimbingan Skripsi							
4.	Tahap Keempat: Sidang Skripsi							
	Sidang Skripsi							
	Revisi Skripsi							

